

DAFTAR PUSTAKA

- Arnilis, Y., Yanti, S., & Fauzi, H. E. (2023). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Oleh Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. *RESAM Jurnal Hukum*, 9(April), 14–25. <http://stihmat.ac.id/jurnal/index.php/resam/article/view/74%0A>
<http://stihmat.ac.id/jurnal/index.php/resam/article/download/74/65>
- Devos, K. (2014). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. Dordrecht. Springer Netherlands.
- Dwi Martandi, P., & Hertati, D. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pnerem=imaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang*. Smantic Scholar, 34–48.
- Dzulfitriah, F., & Saepuloh, C. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *Frima*, 4, 32–39.
- Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2021). *Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Kota Batu)*. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

- Fristyia, T. (2015). *Analisis Hubungan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Btu Kota)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Gaol, L., & Syalom, D. J. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Peenerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Medan Selatan*. Medan. Ournal of Science and Social Research, VI(1), 41–50.
- Husaini, A. (2020). *Analisis Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Malang*. Profit, 14(02), 48–55. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.02.6>
- III, G. C. E. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Irianto, S. E. (2005). *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. UII Press.
- James, S., & Alley, C. (2002). *Tax compliance, self-assessment and tax administration Munich Personal RePEc Archive*. Journal of Finance and Management in Public Services, 2(2), 27–42. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/26906/>
- Karimah, H. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruh Minat Masyarakat*

- Membayar Zakat Profesi Pada Baznas Kabupaten Tapin*. Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan, 10(03), 293.
<https://doi.org/10.35450/jip.v10i03.319>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). *Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework*. Journal of Economic Psychology, 29 (2), 210–225.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Makmur, H. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelmbagaan Pengawasan*. Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Pengembangan Sumberdaya Manusia*. PT Rineka Cipta.
- Pajak, D. J. (2020). *No Title*. <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia (Konsep & Aspek Formal)*. Graha Ilmu.
- Rantung, T. V., & Adi, P. H. (2009). *Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Simposium Nasional Perpajakan II, 1, 1–22.
- Selatan, B. S. (2021). <https://bapenda.makassarkota.go.id/>
- Selatan, B. S. (2023). *PJ Gubernur Sulsel Diskon Pajak Kendaraan Bermotor*. <https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2023/10/11/pj-gubernur-sulsel->

diskon-pajak-kendaraan-bermotor/

Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Penerbit Erlangga.

Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*.

Utami Ayu Triani. (2014). *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Pajak Daerah. http://eprints.undip.ac.id/43779/1/09_UTAMI.pdf

Waluyo. (2007). *Akuntansi Pajak, Edisi 4*. Salemba Empat.

Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia: pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan aturan perpajakan terbaru*. Salemba Empat.

Widaningrum, D. I. (2007). *Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah rendah (Di Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Tamansari Kota Bandung)*. Tugas Skripsi.

Widayanti, & Nurlis. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Simposium Nasional Akuntas\insi XIII.

Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Biodata

Identitas Diri

Nama : Febryanthi Setia Ningsi
 Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 7 Februari 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Rumah : BTP Blok D No. 35
 Telepon Rumah dan HP : 081258319943
 Alamat *E-mail* : febb0702@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. Tahun 2006-2007 : TK Puspa Wangi Makassar
2. Tahun 2007-2013 : SD YPK Betlehem Wamena
3. Tahun 2013-2016 : SMP Negeri 2 Wamena
4. Tahun 2016-2019 : SMA Negeri 1 Wamena
5. Tahun 2020-sekarang : Universitas Hasanuddin (S1 Akuntansi)

Pendidikan Non-Formal

1. Pelatihan Basic Learning Skill, Character, and Creativity (BALANCE)
2. Universitas Hasanuddin 2020
3. Pengaderan Awal Tingkat Senat (PATs) IMA FEB-UH 2021
4. Pengaderana Awal Tingkat Ormaju (PATO) IMA FEB-UH 2021

Pengalaman

Organisasi

1. Wakil Koordinator Kelompok 56 PPGT Tamalanrea
2. Anggota Bidang Spiritualitas dan Kaderisasi PPGT Tamalanrea
3. Sekertaris LKPL VIII PPGT Tamalanrea

Kerja

1. Staff Magang bagian Pelayanan Kantor Imigrasi Makassar Tahun 2022

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Makassar, 29 Juli 2024

Febryanthi Setia Ningsi

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 4637/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala Kantor Samsat Makassar II
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis UNHAS Makassar Nomor :
 0172/UN4.4/PT.01.04/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti
 dibawah ini:

N a m a	: FEBRYANTHI SETIA NINGSI
Nomor Pokok	: A031201061
Program Studi	: Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km,. 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI,
 dengan judul :

**" EFEKTIVITAS PENERAPAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
 MENINGKATKAN MINAT BAYAR PAJAK MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 Februari s/d 28 Maret 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud
 dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 28 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 3: Lembar Disposisi Izin Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPT. PENDAPATAN WILAYAH MAKASSAR II
 Jl. Pajjalang No. 28 Sudiang Raya Telp/Fax (0411) 8037929
 Makassar Kode Pos 90242

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : PTSP	Diterima Oleh :	
Nomor : 4637/5.01/PTSP/2024	Tanggal : 01/03/2024 Jam :	
Tanggal : 28/02/2024	Agenda Nomor : 11	
Perihal : IZIN PENELITIAN	Diteruskan Kepada : KEPALA UPT	
ISI DISPOSISI ya kasi pelayan & data. y dibantu. ylos Terima kasih. fi: 9/3-24	No.	PEJABAT
	1	Kepala UPT. Pendapatan Wilayah Makassar II
	2	Kasubag Tata Usaha
	3	Kasi. Pendataan dan Penagihan
	4	Kasi. Pelayanan

Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara dengan pegawai Kantor samsat Makassar II:

6. Kapan mulai diadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor atau penghapusan sanksi administratif pada Samsat Makassar II?
7. Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor dilakukan setiap tahun?
8. Apa target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah melalui pengadaan program pemutihan pajak ini?
9. Apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor terkait adanya pemutihan pajak?
10. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di samsat makassar II pada saat terjadinya pemutihan pajak?
11. Apakah pemutihan pajak berlaku jika pembayaran pajak dilakukan melalui aplikasi SIGNAL? Jika Ya, Bagaimana mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di aplikasi SIGNAL pada saat terjadinya pemutihan pajak? Jika Tidak, mengapa?
12. apakah pemutihan pajak dapat dilakukan di gerai-gerai atau loket-loket samsat ataupun di samsat keliling?
13. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor di loket-loket pembayaran pajak pada saat terjadinya pemutihan pajak?
14. Apakah ada cara lain untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor dan tetap mendapatkan kesempatan pemutihan pajak kendaraan bermotor?
15. Sebutkan dampak positif dan negatif dari pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor bagi Samsat Makassar II!
16. Apa saja keuntungan yang didapatkan dari pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Samsat Makassar II?
17. Denda Pajak apa saja yang dihapuskan pada program pemutihan pajak ini ?
18. Apakah ada rentang waktu bagi penunggak pajak yang akan mengikuti program pemungutan pajak kendaraan bermotor?
19. Apa saja kendala yang ditemui dalam program pemutihan pajak ini?
20. Apakah pemutihan pajak kendaraan bermotor efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Makassar? Ataupun ada alternatif lain yang dapat mendorong masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya? (sebagai contoh peraturan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor jika menunggak dua tahun)

Daftar pertanyaan wawancara dengan wajib pajak:

5. Berapa jumlah kendaraan yang bapak/ibu miliki?
6. Apakah bapak/ibu membayarkan pajaknya dengan langsung datang di kantor samsat atau melalui gerai-gerak pajak? Atau melalui aplikasi SIGNAL?
7. Apakah bapak/ibu pernah telat membayar pajak kendaraan bermotor?
8. Apa yang mendasari bapak/ibu pernah/tidak pernah telat membayar pajak kendaraan bermotor?
9. Menurut bapak/ibu, apakah faktor yang menyebabkan seseorang telat membayar pajak kendaraan bermotor?

10. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2023? Apa saja yang ibu ketahui tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor?
11. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai pemutihan pajak? Apakah program tersebut membantu masyarakat?
12. Apa manfaat dari pemutihan pajak kendaraan bermotor yang bapak/ibu rasakan atau ketahui?
13. Apakah ada kerugian atau masalah yang disebabkan oleh pemutihan pajak kendaraan bermotor?